

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADINYA SENKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK**

## **ABSTRAK**

**Hasangapan Hutagalung\***

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong pertumbuhan transaksi elektronik (e-commerce) yang pesat. Namun, di sisi lain, potensi terjadinya sengketa dalam transaksi elektronik juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam melakukan transaksi elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dalam transaksi elektronik, perlindungan hukum bagi konsumen dalam sengketa transaksi elektronik, serta upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan per Undang-Undang, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Pengaturan Transaksi e-commerce dalam Tata Hukum Indonesia. diatur dalam 4 (empat) aturan. Adapun pengaturan hukum dalam transaksi elektronik diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Sistem Elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam sengketa transaksi elektronik diberikan melalui pembuatan dan penegakan peraturan. Peraturan yang dibuat memuat hak-hak konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi. Dengan adanya peraturan tersebut, maka terdapat jaminan bahwa hak-hak konsumen dilindungi secara hukum. Selanjutnya, peraturan tersebut harus ditegakkan berdasarkan ketentuan normatif, termasuk pemberlakuan sanksi-sanksi hukum yang diatur di dalamnya. Upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan sarana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai pedoman bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya. Mekanisme serupa juga dapat ditempuh oleh pelaku usaha jika mendapat konsumen yang tidak beritikad baik.

**Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen, Transaksi Elektronik, Sengketa**

---

\*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

# **LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN ELECTRONIC TRANSACTIONS IN THE EVENT OF AN ELECTRONIC TRANSACTION DISPUTE**

## **ABSTRACT**

***Hasangapan Hutagalung \****

*The development of information technology and the internet has encouraged the rapid growth of electronic transactions (e-commerce). However, on the other hand, the potential for disputes in electronic transactions is also increasing. Therefore, adequate legal protection is needed for consumers to ensure certainty and security in conducting electronic transactions.*

*This research aims to find out the legal arrangements in electronic transactions, legal protection for consumers in electronic transaction disputes, and legal efforts to resolve consumer disputes in electronic transactions.*

*The research method used is normative juridical research. Normative juridical research uses a problem approach based on laws and regulations, theories and concepts that are directly related to this research.*

*The research results of this thesis include: Regulation of e-commerce transactions in the Indonesian Legal System. regulated in 4 (four) rules. The legal arrangements in electronic transactions include the Civil Code (KUHPerdata) and the Commercial Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) and Law Number 7 of 2014 concerning Electronic System Trading. Legal protection for consumers in electronic transaction disputes is provided through the creation and enforcement of regulations. The regulations made contain the rights of consumers as protected legal subjects. With these regulations, there is a guarantee that consumer rights are legally protected. Furthermore, these regulations must be enforced based on normative provisions, including the application of legal sanctions stipulated therein. Legal efforts to resolve consumer disputes in electronic transactions can be carried out using the means regulated in the Consumer Protection Law (UUPK) as a guide for consumers to fight for their rights. Similar mechanisms can also be pursued by business actors if they encounter consumers who are not in good faith.*

***Keywords: Consumer legal protection, Electronic Transactions, Disputes***

---

*\*Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*